

**KEMISKINAN MASYARAKAT KAWASAN HUTAN  
(Studi pada Suku Kalende di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara)**

La Ode Muhammad Deden Marrah Adil

**ABSTRACT**

*Poverty community forest is a classic problem that never completed. Poverty alleviation is actually the focus of development programs sustainable country and often exploited politically, especially without a clear realization of community empowerment. Therefore, it takes all the effort in a planned, integrated and systemic to enable these communities out of poverty. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that community empowerment through the development of agricultural/ plantation, human resource capacity building and coordination of functional institutions is absolutely necessary kemasyarakat Kalende tribal society. Thus, they can be detached from the rope noose of poverty that have binding Kalende tribal society.*

**Keyword: Kalende and Poverty**

**PENDAHULUAN**

Masyarakat yang menghuni hutan di Nusantara ini pada umumnya memiliki kebudayaan tradisional, sebut saja suku anak dalam di pulau Sumatera, suku Dayak di Kalimantan, suku Bajawa di Flores, To Balo atau orang belang dan suku Kribo di Kabupaten Barru, tidak terkecuali suku Kalende di pulau Buton. Untuk menopang sumber kehidupan mereka, umumnya melakukan kegiatan berladang, baik sifatnya secara tetap (*permanent*) maupun berpindah (*nomaden*).

Keunikan suku-suku penghuni hutan adalah, unsur-unsur kebudayaan dan kearifan lokalnya menjaga baik pelestarian hutan. Dalam arti, tidak mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam hasil hutan sekehendak hatinya. Orang Kalende misalnya, keberadaan mereka di kawasan hutan lindung justru menjadi mata rantai utama terjaganya keseimbangan ekosistem hutan *Lambusango*, sebagai wilayah hutan terlarang (*Kaombo*) sejak pemerintahan Kesultanan Buton masih berjaya hingga bubarnya tahun 1960.

Kalende merupakan sebuah kawasan pemukiman masyarakat pedalaman hutan, yang secara administratif masuk pada wilayah Pemerintahan Desa Kalende Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalende bukan saja tersemaat sebagai nama sebuah desa, tetapi juga ditujukan

---

\*) Staf Pengajar STKIP Pembangunan Indonesia

pada orang-orang yang menghuni kawasan hutan Lambusango yang pada hari ini sudah menjadi hutan terkonservasi negara, dan terlindungi.

Hakikat pemerataan pembangunan nasional dari aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial adalah tersentuhnya seluruh komponen masyarakat agar memungkinkan dirinya menopang cita-cita bangsa. Tidak terkecuali orang Kalende yang mendiami kawasan pinggir hutan Lambusango di Kabupaten Buton yang masih terbelakang dan terus terjerat kemiskinan di tengah wacana optimalisasi potensi sumberdaya lokalitas dalam bingkai otonomi daerah. Orang Kalende sebagai masyarakat pinggir hutan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan sebagai sumber mata pencahariannya. Padahal, desa pinggir hutan mengalami pertumbuhan populasi cukup besar dan menerima penetrasi kapitalisme cukup dala. Dengan angka kelahiran yang tinggi dan migrasi keluar yang rendah, desa pinggir hutan terus mengalami pepadatan populasi dan perluasan area (Salman, 2012). Oleh karena itu, kemiskinan menjadi fenomena umum dan signifikan pada desa pinggir hutan. Walaupun kemiskinan orang Kalende bukan sebab dari pemberian hak pengelolaan hutan (HPH) kepada korporasi bermodal.

Bahwa kemiskinan dan keterbelakangan bukan karena masyarakat sejak semula tidak memiliki faktor-faktor dinamis. Mereka miskin dan terbelakang karena kesempatan tidak diberikan kepada mereka atau karena berbagai kesempatan sudah dihancurkan dan hilang dari jangkauan mereka. Secara historis, proses penghancuran itu telah berlangsung sejak lama, mulai dari zaman feodalisme kerajaan, kolonial Belanda, dan akhirnya pada zaman pertumbuhan ekonomi atau Pelita saat ini (Abustam, 1991).

Di era otonomi daerah saat ini, pembangunan dikelola secara mandiri oleh masing-masing daerah. Biasanya, pemerataan dan perluasan pembangunan dari segi akses dan pelayanan publik menjadi sasaran utama pemerintahan berkuasa. Tujuannya, interaksi sosial setiap komponen masyarakat dapat terwujud secara terbuka. Dengan harapan, dampak pembangunan itu juga semakin cepat dirasakan. Faktanya, orang Kalende terus terjebak dalam kemiskinan. Kecuali sistem sosikultural yang mengikatnya, orang Kalende masih saja menggunakan sarung sebagai pakaian sehari-hari, tanpa dilengkapi baju, celana dan lainnya. Uraian tersebut semakin menunjukkan bahwa, kekhasan orang Kalende sekaligus menjadi anti tesa upaya pembangunan dalam berbagai aspek berkehidupan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buton. Tentu saja, kedua pokok persoalan tersebut dilatari asumsi bahwa, tidak ada satupun masyarakat di dunia ini yang tidak dalam keadaan berubah. Walaupun patut disadari bahwa perubahan itu dapat secara cepat (revolutif), alamiah (evolitif) bahkan mundur (dekonstruktif). Dengan kata lain, kemiskinan tersebut akibat terjadi pergeseran masyarakat ke arah yang lebih terbuka atau akibat dari globalisasi (Ballard, 2005: 11).

Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana interaksi dan akselerasi yang terjadi antara upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buton

dengan orang Kalende sebagai masyarakat pinggir hutan hingga membuat mereka terus dalam keadaan miskin? Bilamana kemiskinan dilatari suatu determinan tertentu, khususnya yang berpotensi secara internal, bagaimana strategi penanganannya oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kemiskinan orang Kalende dan upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Buton merupakan tesis dan anti tesis yang perlu disintesis guna menghasilkan upaya solutif atas kemiskinan yang dialaminya. Dengan demikian, fenomena kemiskinan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan perlu mendapat perhatian.

Kemiskinan masyarakat kawasan hutan merupakan permasalahan klasik yang tidak pernah tuntas. Penuntasan kemiskinan yang sejatinya menjadi fokus program *development suistainable* negara bahkan seringkali tereksplorasi secara politis, tanpa realisasi yang jelas terutama pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan segenap upaya secara terencana, terpadu dan sistemik untuk memampukan masyarakat tersebut keluar dari kemiskinan.

Tulisan ini menyorot masyarakat Kalende di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pertimbangan sebagai berikut: (a) Masyarakat suku Kalende bermukim di pedalaman kawasan hutan Lambusango. Tepatnya di Desa Kalende, Kecamatan Kapontori, kurang lebih 20 km dari pusat ibukota Kabupaten Buton (b) Lokasi pemukiman suku Kalende yang cukup terisolir akibat belum adanya akses jalan raya (c) Tidak tersedianya sarana dan prasarana publik, seperti puskesmas, sekolah, kantor desa, cenderung membuat masyarakat suku Kalende masih terbatas mendapat pelayanan publik (d) Resistensi budaya masyarakat suku Kalende masih cukup kuat. Ditunjukkan dengan kemampuan mempertahankan tata nilai dan peradatannya dalam kehidupan sehari-hari, dan (e) Belum adanya program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat suku Kalende.

#### **HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN**

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Oleh karena itu, Arraiyah (2007) mengelompokkan kemiskinan menjadi tiga jenis sebagaimana kajian kemiskinannya dalam perspektif islami, yaitu (1) kemiskinan materi (2) kemiskinan jiwa/rohani, dan (3) kemiskinan dalam arti khusus, yaitu kebutuhan manusia terhadap penciptanya. Jenis kemiskinan itu disebutkan secara tersendiri dan adakalanya disebutkan dalam kaitan antara satu dengan lainnya.

Kajian tentang kemiskinan pada umumnya terarah pada dua hal utama, yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan dan cara-cara yang dapat tempuh untuk menaggulangnya. Tentu saja dengan memperhatikan latar faktor yang mendukung maupun menghambatnya.

Konseptualisasi ukuran kemiskinan setidaknya dapat dikenal secara umum dengan dua terminologi utamanya, yaitu kemiskinan yang bersifat absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut menyangkut pendapatan dan kebutuhan yang berkaitan/terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok (*basic need*). Kebutuhan pokok tersebut merupakan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Sedangkan kemiskinan relatif adalah besaran ketimpangan antara tingkat hidup orang kaya dan miskin semakin membuat jumlah penduduk selalu miskin.

Berdasarkan kedua kategorisasi kemiskinan di atas, maka ukuran kemiskinan oleh Bank Dunia (*World Bank*) dilompokkannya ke dalam tiga bagian, yaitu: (1) Jika 40 persen jumlah penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasionalnya maka pembagian pembangunan sangat timpang (2) Apabila 40 persen lapisan penduduk berpendapatan rendah menikmati antara 12 – 17 persen pendapatan nasional dianggap sedang, dan (3) Jika 40 persen dari penduduk berpendapatan menengah menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional maka dianggap rendah.

Hadiwiguno dan Pakpahan (1993) dalam studinya tentang pemetaan wilayah-wilayah miskin di Indonesia menemukan bahwa, karakteristik utama dan penyebab utama kemiskinan pada wilayah miskin mencakup empat hal, yaitu: (1) sumber daya alam (2) teknologi dan unsur pendukungnya (3) sumber daya manusia, dan (4) sarana dan prasarana termasuk kelembagaan. Dikemukakan bahwa, sasaran langkah-langkah penanggulangan terhadap kemiskinan itu adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari sumber-sumber penggerakannya melalui peningkatan mutu sumber daya, perbaikan teknologi, maupun efektivitas koordinasi dari faktor-faktor tersebut melalui penyempurnaan kelembagaan/organisasi sosial ekonomi di masing-masing wilayah.

Hasil penelitian tentang dampak program pembaharuan agraria nasional terhadap keadaan sosial ekonomi dan ekologi masyarakat lokal di Desa Pangradin Kabupaten Bogor yang dilakukan Pitaloka (2010: 342) diketahui bahwa, untuk memampukan masyarakat atas pemanfaatan tanah lahan diperlukan *Institutional Building* untuk mengawasi keterlaksanaan program. Sementara Oktaviani dan Dharmawan (2010: 354) dalam temuan penelitiannya terkait kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya air di kampung Kuta menyebutkan bahwa salah satu unsur terpenting dari terlestarikannya sumberdaya air di desa tersebut sebab masyarakat setempat membudayakan *Pamali* sebagai kearifan lokal yang senantiasa dijunjung tinggi. Kedua penelitian tersebut ikut didukung temuan Marina (2011: 96) kaitannya dengan konflik sumberdaya hutan di kawasan konservasi gunung Halimun bahwa, salah satu penyebab konflik adalah adanya upaya pemerintah memasukkan kawasan tersebut ke dalam zona rehabilitasi taman nasional sehingga melahirkan perbedaan persepsi dengan masyarakat setempat, kepentingan, tata nilai, dan pengakuan kepemilikan. Sementara bagi

masyarakat setempat, zona hutan tersebut merupakan hak ulayat yang sudah diwariskan secara turun temurun.

Menyimak ketiga hasil penelitian di atas, keberadaan masyarakat miskin Kalende di kawasan hutan Lambusango sejatinya sudah menjadi bagian penting atas kelestarian ekosistem hutan. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat Kalende secara proporsional sesuai dengan tata nilai (aturan adat) yang mengikatnya adalah salah satu aspek penting kelestarian hutan itu sendiri. Hutan yang bagi masyarakat Kalende sebagai kawasan *kaombo* (terlindung) diawasi dari perlakuan potensi sumberdaya isinya secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi.

#### **METODE PENELITIAN**

Latar utama sebuah penelitian adalah: (1) menemukan masalah/filosofis, dan (2) mencari masalah/praksis. Penelitian yang bersifat sosiologis umumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif, sebab kaya akan pendekatan dalam *setting* sealamiah mungkin. Salah satu keunggulannya, data-data temuan lapangan dapat diinterpretasi peneliti secara mendalam, mengingat setiap objek/subyek penelitian memiliki kekhasan yang perlu terdiskripsikan secara baik (kasuistik).

Auerbach dan Louis (2003: 126) mengemukakan beberapa karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: (1) paradigma kualitatif berfokus pada suara dari peserta/informan/partisipan (2) aktivitas penelitian diarahkan untuk menghasilkan hipotesis dan bukan untuk menguji hipotesis sehingga tercipta variasi pengalaman yang tidak universal, dan (3) adanya kolaborasi kemitraan antara peneliti dengan informan/partisipan penelitian. Hal senada juga dikemukakan (Satori dan Komaria, 2010); (Ratna, 2010). Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sejumlah pemaknaan atas fenomena kemiskinan suku Kalende. Relevansinya dengan upaya pembangunan di era otonomi daerah. Khususnya di Kabupaten Buton.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pertimbangan sebagai berikut: (a) Masyarakat suku Kalende bermukim di pedalaman kawasan hutan Lambusango. Tepatnya di Desa Kalende, Kecamatan Kapontori, kurang lebih 20 km dari pusat ibukota Kabupaten Buton (b) Lokasi pemukiman suku Kalende yang cukup terisolir akibat belum adanya akses jalan raya (c) Tidak tersedianya sarana dan prasarana publik, seperti puskesmas, sekolah, kantor desa, cenderung membuat masyarakat suku Kalende masih terbatas mendapat pelayanan publik (d) Resistensi budaya masyarakat suku Kalende masih cukup kuat. Ditunjukkan dengan kemampuan mempertahankan tata nilai dan peradatannya dalam kehidupan sehari-hari, dan (e) Belum adanya program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat suku Kalende.

Fokus penelitian ini adalah kemiskinan orang Kalende di tengah upaya pembangunan daerah di Kabupaten Buton. Untuk menghindari perbedaan interpretasi atas fokus penelitian ini, selanjutnya dapat dideskripsikan sebagai berikut: (a) Kemiskinan, adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan ekonomi, termasuk rendahnya partisipasi pendidikan, dan kurangnya layanan kesehatan (b) Kawasan, adalah bagian tertentu dari hutan Lambusango yang terlindungi, memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria fisik, biologi, sosial dan ekonomi agar tetap dipertahankan keberadaannya (c) Pembangunan, adalah upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat, dan (d) Pengentasan kemiskinan, adalah upaya yang terpadu, terarah, terencana dan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Buton dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat suku Kalende.

Berdasarkan berbagai uraian dan fakta empiris sebelum ini, maka tulisan ini difokuskan pada kemiskinan orang Kalende di tengah upaya pembangunan daerah di Kabupaten Buton. Untuk menghindari perbedaan interpretasi atas fokus sorotan dalam tulisan ini, selanjutnya dapat dideskripsikan sebagai berikut: (a) Kemiskinan, adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan ekonomi, termasuk rendahnya partisipasi pendidikan, dan kurangnya layanan kesehatan (b) Kawasan, adalah bagian tertentu dari hutan Lambusango yang terlindungi, memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria fisik, biologi, sosial dan ekonomi agar tetap dipertahankan keberadaannya (c) Pembangunan, adalah upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat, dan (d) Pengentasan kemiskinan, adalah upaya yang terpadu, terarah, terencana dan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Buton dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat suku Kalende. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sejumlah pemaknaan atas fenomena kemiskinan suku Kalende. Relevansinya dengan upaya pembangunan di era otonomi daerah. Khususnya di Kabupaten Buton.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menyimak berbagai temuan penelitian yang telah dikemukakan sebelum ini, dapat dipahami bahwa kemiskinan dan latar penyebabnya menyangkut manusia dan di luar manusia. Artinya bahwa, manusia dengan segenap sumber daya yang dimiliki merupakan instrumen yang dapat mengeluarkan masyarakat dari jerat kemiskinan dengan cara memfungsikan komponen non manusia seperti organisasi/lembaga secara optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan yang tengah dihadapi.

Kemiskinan yang terus terjadi dan mengakar pada berbagai kelompok masyarakat dan wilayah di Indonesia, termasuk dalam hal ini masyarakat suku Kalende di kawasan Hutan Lambusango Kabupaten Buton perlu mendapat

perhatian serius dari Pemerintah. Perhatian tersebut berupa tindakan-tindakan nyata program pemberdayaan masyarakat. Caranya, mengoptimalkan sumber daya manusia dan non manusia secara efektif dan efisien melalui pergerakan-pergerakan kelembagaan sosial ekonomi kemasyarakatan secara koordinatif dan integratif.

Pergerakan kelembagaan sosial ekonomi kemasyarakatan yang koordinatif tersebut dapat menyentuh tiga sektor utama (2012) sebagai berikut:

1. Pembangunan Sektor Pertanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat di pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali teknologi disektor pertanian dan infrastruktur.

2. Pembangunan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah.

3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan masyarakat sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan dan program pengentasan kemiskinan.

## **SIMPULAN**

Diskursus kemiskinan yang terus terjadi dan menjerat masyarakat suku Kalende merupakan satu dari ribuan fenomena sosial yang harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah setempat. Pasalnya, kemiskinan tersebut merupakan antitesa dalam upaya pembangunan daerah dalam masa otonomi daerah, dimana daerah dituntut agar dapat memampukan seluruh aspek berkehidupan masyarakatnya guna dapat menopang cita-cita pembangunan nasional.

Kemiskinan masyarakat suku Kalende merupakan suatu keadaan dimana masyarakatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) dan menciptakan satu ruang ketimpangan sosial ekonomi yang sangat nyata dengan masyarakat kawasan hutan di sekitarnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakatnya melalui pengembangan kegiatan pertanian/perkebunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi fungsional lembaga kemasyarakatan mutlak dibutuhkan masyarakat suku Kalende. Dengan demikian,

mereka dapat terlepas dari jerat tali kemiskinan yang selama ini mengikat masyarakat suku Kalende.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abustam, Idrus dan Irwansyah, Idham. 2010. *Komunitas Pedesaan, Budaya Kemiskinan, dan Pendidikan Orang Dewasa*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Araiyyah, Hamdar. 2007. *Meneropong Fenomena Kemiskinan. Telaah Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Auerbach, F. Carl dan Silverstein, B. Louis. *Qualitative Data*. New York: New York University Press.
- Ballard, Nadejda. 2005. *Globalitation and Poverty*. Philadelphia: Chelsea House Publisher.
- Hadiwiguno, Soetatwo dan Pakpahan, Agus. 1993. *Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia*. Prisma, Nomor 3, Tahun XII, 1993, h. 27.
- Marina, Ina dan Dharmawan, Aryadi Hadi. 2011. *Analisis Konflik Sumberdaya Hutan di Kawasan Konservasi*. Sodality. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. ISSN 1978-4333. Vol. 05. No. 01. 2011. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.
- Oktaviani, Aulia Sumarna dan Dharmawan, Aryadi Hadi. 2010. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta*. Sodality. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. ISSN 1978-4333. Vol. 04. No. 03. 2010. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.
- Pitaloka, Ningtyas Maharani Kusuma. 2010. *Dampak Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi dan Ekologi Masyarakat Lokal*. Sodality. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. ISSN 1978-4333. Vol. 04. No. 03. 2010. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Salman, Darmawan. 2012. *Sosiologi Desa. Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*. Makassar: Inninawa.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.